OPTIMALISASI WEBSITE PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Anggun Permatasari
NPP. 33.0958
Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan
Email : permataanggun49@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dedhy Guntoro, SE., MM.
Email: dedhy_guntoro@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *The implementation of e-government is a crucial instrument in accelerating regional public information disclosure and local accountability. However, the official website of South Buton Regency faced distinct operational obstacles, such as inadequate data integration across departments, high frequency of server gateway errors (502 bad gateway), delayed data updates, and unequal network dispersion in remote zones like Lapandewa District, creating an empirical vacuum regarding internal managerial strategies within the communication agency. As emphasized, digital governance demands adaptive institutional capacity to prevent public service stagnation.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze and dissect the strategic optimization of the official website managed by the Department of Communication and Informatics of South Buton Regency to promote transparency and citizen engagement.* ***Method:*** *Utilizing a descriptive qualitative method with inductive thematic approaches, primary data was gathered from 20 targeted purposive sampling informants (comprising agency heads, technical officers, and community members), supplemented by technical website observations and institutional documentation processed via data triangulation methods governmental research methodology.* ***Result:*** *The findings show that portal optimization remains suboptimal across multiple functional parameters. Informational and transparency elements are deficient due to critical infrastructural network limitations in Lapandewa, shortage of professional IT programmers, dynamic budget limitations for outreach, and low internal cross-departmental coordination resulting in missing fiscal disclosure metrics.* ***Conclusion:*** *Strategic adjustments are immediately required, including technical network reinforcements, systemic staff training workflows, comprehensive multi-media socialization schedules, and standardized fiscal item visibility to transform.*
Keywords:*Diskominfo:E-Government; Government Website; Optimization; Public Information Transparency*

ABSTRAK

Permasalahan (Research Gap): Penerapan e-government merupakan instrumen krusial dalam mempercepat keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas lokal. Di Kabupaten Buton Selatan, website resmi daerah yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika masih menghadapi berbagai hambatan mendasar seperti ketidakkonsistenan pembaruan data antar-OPD, insiden error teknis (502 Bad Gateway), keterbatasan fitur interaktif, serta kendala blank-spot siber di Kecamatan Lapandewa, sehingga memicu gap empiris terkait kapabilitas manajerial tata kelola situs. Akselerasi keterbukaan informasi di era digital menuntut kesiapan kapasitas kelembagaan yang adaptif di tingkat lokal. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif optimalisasi website Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dalam mewujudkan nilai transparansi informasi publik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. **Metode:** Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 20 informan yang dipilih secara purposive, observasi fungsional sistem, dan teknik dokumentasi analitis yang direduksi serta divalidasi menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik. **Hasil:** Hasil riset menunjukkan optimalisasi situs web belum terlaksana secara menyeluruh. Hal ini terbukti dari minimnya data anggaran sektoral yang disajikan secara rinci, lambatnya kapasitas respon pengaduan siber, keterbatasan jumlah pranata computer dan belum terintegrasikannya portal desa serta OPD secara utuh akibat hambatan siber geografis dan minimnya alokasi anggaran sosialisasi lapangan. **Kesimpulan:** Strategi optimalisasi mendesak dilakukan melalui penguatan infrastruktur siber desa, penyelenggaraan diklat pemrograman berkala bagi aparatur, perluasan media sosialisasi QR-Code publik, serta pembukaan informasi publikk transparansi keuangan daerah demi mewujudkan tata pemerintahan yang baik optimalisasi website pemerintah daerah juga perlu didukung oleh evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap kualitas layanan informasi yang disediakan agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan serta perkembangan teknologi digital yang semakin dinamis. Dengan demikian, website pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga menjadi sarana yang efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga, serta mendukung transformasi.

Kata Kunci: Diskominfo Buton Selatan: E-Government; Transparansi Informasi; Website Pemerintah:

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Transformasi digital di sektor publik merupakan indikator kemajuan tata kelola pemerintahan modern. Berdasarkan laporan UN E-Government Survey 2024, Indonesia berhasil menempati peringkat ke-64 dari 193 negara, menunjukkan peningkatan lompatan sebanyak 13 peringkat dibanding periode sebelumnya. Capaian nasional ini mewajibkan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Situs web resmi daerah bukan lagi sekadar instrumen pelengkap administrasi publik, melainkan berkedudukan sebagai infrastruktur siber utama dalam merealisasikan asas keterbukaan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Kajian tata kelola pemerintahan, akselerasi keterbukaan informasi di era digital menuntut kesiapan kapasitas kelembagaan yang adaptif di tingkat lokal agar tidak terjadi stagnasi pelayanan. Melalui media digital, masyarakat berhak memantau, mengevaluasi, serta berpartisipasi aktif dalam memandu jalannya roda birokrasi pemerintahan.
Pemerintah Kabupaten Buton Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah meluncurkan portal resmi dengan alamat web.butonselatankab.go.id sebagai implementasi dari Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pendayagunaan Website dan Media Sosial. Keberadaan portal ini ditujukan untuk mendukung perwujudan Misi Ketiga daerah, yakni Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien. Namun, implementasinya di lapangan masih memerlukan konseptualisasi yang matang mengenai manajemen risiko teknologi. Keberhasilan e-government sangat dipengaruhi oleh konsistensi regulasi operasional serta kejelasan pembagian urusan instruksional siber. Kendati demikian, hasil penjajakan awal menemukan kontradiksi teknis yang menghambat misi pelayanan prima. Layanan visual informasi seringkali mengalami gangguan aksesibilitas berupa malfungsi server 502 Bad Gateway, ketiadaan pembaruan data publik secara berkala, dan visualisasi fitur Web OPD yang belum mencerminkan integrasi menyeluruh antar unit kerja (Dwiyanto 2021)

Selain sebagai sarana penyebarluasan informasi, website pemerintah daerah merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam perspektif e-government, pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan pemerintah untuk menyediakan akses informasi yang lebih cepat, luas, dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Transparansi informasi melalui website pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai sarana membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Transparansi informasi yang disajikan melalui website pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendukung terwujudnya prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, kualitas pengelolaan website pemerintah menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan implementasi pemerintahan berbasis elektronik (Johannes 2017)

Perkembangan transformasi digital sektor publik secara global juga menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi telah menjadi kebutuhan utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Implementasi e-government memberikan nilai publik (public value) melalui peningkatan kualitas pelayanan, efisiensi administrasi, keterbukaan pemerintah, peningkatan kepercayaan masyarakat, serta terciptanya nilai sosial yang lebih luas. Dengan demikian, keberhasilan website pemerintah tidak hanya diukur dari keberadaan teknologi yang digunakan, tetapi juga dari kemampuannya dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai pengguna layanan publik (Twizeyimana and Andersson 2019)

Transformasi digital pemerintahan tidak sekadar berfokus pada digitalisasi layanan, melainkan mencakup perubahan proses kerja, budaya organisasi, tata kelola, dan pola interaksi antara pemerintah dengan masyarakat (Mergel, Edelmann, and Haug 2019). Oleh sebab itu, pemerintah daerah dituntut untuk membangun sistem informasi yang terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis di era digital. Transformasi digital yang berhasil akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas birokrasi, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah (Dwi and Sari 2025)

Penerapan e-government diharapkan mampu memperkuat transparansi dan mencegah praktik penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Implementasi e-government memiliki implikasi yang besar dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Namun demikian, penelitian tersebut juga menemukan bahwa penerapan e-government di pemerintah daerah belum sepenuhnya efektif karena masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya pengawasan, dan rendahnya kualitas pengelolaan sistem informasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan e-government tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan organisasi dalam mengelola dan memanfaatkan teknologi secara optimal (Twizeyimana and Andersson 2019)

Berbagai penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa optimalisasi media digital pemerintah masih menjadi tantangan di banyak daerah. Penggunaan website dalam pelayanan publik belum berjalan optimal akibat kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola website, serta keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap layanan digita (Khoirunisa 2021b). Optimalisasi website pelayanan publik terkendala oleh minimnya infrastruktur teknologi informasi dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital (Farah Indriyani 2022). Optimalisasi aplikasi PPID dalam pelayanan informasi publik masih menghadapi kendala berupa kurangnya tenaga teknis dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterbukaan informasi publik (A Nurrahman, Sabaruddin, and Salma 2022). Temuan serupa juga ditunjukkan oleh penelitian Briyan Boseren 2023 mengenai Optimalisasi Website Asmatkab yang mengungkapkan bahwa rendahnya kualitas konten informasi, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta keterbatasan infrastruktur jaringan internet menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi website pemerintah daerah (Boseren 2023). Keberhasilan layanan digital pemerintahan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, dukungan fasilitas teknologi informasi, serta komitmen organisasi dalam melakukan inovasi pelayanan publik secara berkelanjutan (Tyas and Choiriyah 2024)

Kondisi tersebut memiliki relevansi dengan pengelolaan website Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Meskipun Pemerintah Kabupaten Buton Selatan telah memiliki website resmi sebagai sarana penyampaian informasi publik, hasil observasi awal menunjukkan masih adanya berbagai permasalahan seperti gangguan akses server, belum optimalnya pembaruan informasi secara berkala, keterbatasan integrasi informasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta minimnya fitur interaktif yang dapat mendukung partisipasi masyarakat. Apabila kondisi tersebut terus berlangsung, maka fungsi website sebagai media transparansi informasi publik tidak dapat berjalan secara maksimal dan berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, optimalisasi website Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menjadi suatu kebutuhan yang mendesak untuk mendukung terwujudnya transparansi informasi publik. Website pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam memperkuat akuntabilitas, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Oleh karena itu, penelitian mengenai Optimalisasi Website Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dalam Mewujudkan Transparansi Informasi Publik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui tingkat optimalisasi website, faktor-faktor penghambat yang dihadapi, serta strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas website sebagai media transparansi informasi publik.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kesenjangan empiris (research gap) dalam penelitian ini terletak pada aspek struktural, teknis, kelembagaan, dan geografis yang belum banyak dikaji secara komprehensif dalam penelitian-penelitian terdahulu. Sebagian besar studi mengenai e-government dan optimalisasi website pemerintah daerah cenderung berfokus pada tingkat kepuasan pengguna, kualitas layanan digital, serta efektivitas penyampaian informasi dari perspektif masyarakat sebagai pengguna akhir. Namun demikian, masih relatif sedikit penelitian yang secara mendalam mengkaji kesiapan kapasitas internal organisasi pengelola website, khususnya pada pemerintah daerah yang memiliki karakteristik geografis kepulauan dan keterbatasan infrastruktur digital. Padahal, keberhasilan implementasi e-government tidak hanya ditentukan oleh tingkat penerimaan masyarakat terhadap layanan digital, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, tata kelola organisasi, dukungan infrastruktur teknologi informasi, serta kapasitas kelembagaan dalam mengelola sistem informasi pemerintahan secara berkelanjutan (Mensah 2020)

Kabupaten Buton Selatan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain karena merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar seperti Siompu dan Batu Atas. Kondisi geografis tersebut menimbulkan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, terutama terkait pemerataan akses internet, distribusi informasi publik, serta efektivitas pemanfaatan teknologi digital oleh masyarakat. Di satu sisi, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan telah menetapkan Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pendayagunaan Website dan Media Sosial yang mengamanatkan optimalisasi media digital pemerintah hingga pada tingkat perangkat daerah dan pemerintahan desa. Akan tetapi, hasil observasi awal menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal karena masih terdapat wilayah yang mengalami keterbatasan konektivitas internet dan kualitas jaringan yang belum stabil. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan dengan realitas implementasi di lapangan (Ma 2026).

Selain permasalahan infrastruktur, penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan website pemerintah daerah. Pengelolaan website pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buton Selatan masih didominasi oleh operator yang memperoleh kemampuan teknis melalui proses belajar mandiri (otodidak) dan belum seluruhnya memiliki latar belakang pendidikan maupun jabatan fungsional yang relevan di bidang teknologi informasi, pranata komputer, atau pengelolaan sistem informasi pemerintahan. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas pemeliharaan website, kecepatan pembaruan informasi, pengembangan fitur digital, hingga aspek keamanan siber. Padahal, keberhasilan transformasi digital sektor publik sangat bergantung pada kompetensi aparatur yang mengelola sistem digital tersebut (Criado, Sandoval-Almazan, and Gil-Garcia n.d.)

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena perkembangan e-government menuntut pemerintah daerah untuk menyediakan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat. Website pemerintah daerah merupakan salah satu instrumen utama dalam mewujudkan

keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun, website Pemerintah Kabupaten Buton Selatan masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti informasi yang tidak diperbarui secara berkala, fitur interaktif yang belum optimal, keterbatasan sumber daya manusia, gangguan teknis pada website, serta keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah seperti Kecamatan Lapandewa. Permasalahan tersebut menyebabkan fungsi website sebagai sarana transparansi informasi publik belum berjalan secara maksimal.

Selain itu, penelitian terdahulu umumnya hanya berfokus pada efektivitas website sebagai media pelayanan publik atau media informasi, sedangkan kajian yang secara khusus menganalisis strategi optimalisasi website pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi informasi publik, khususnya pada wilayah dengan karakteristik geografis kepulauan seperti Kabupaten Buton Selatan, masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya research gap yang perlu diteliti lebih lanjut. Penelitian ini juga mendesak dilakukan karena hasilnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buton Selatan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan website, memperkuat implementasi e-government, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendukung terwujudnya good governance melalui transparansi informasi publik yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai akademis dan praktis yang tinggi bagi pengembangan tata kelola pemerintahan digital di daerah.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penyusunan ringkasan skripsi ini didasari oleh telaah terhadap ragam literatur ilmiah global dan lokal terkemuka sebagai komparasi ilmiah: (1) Penelitian (Khoirunisa 2021b) mengevaluasi website Disdukcapil Pekanbaru yang fokus pada layanan krisis pandemi; (2) Riset (Farah Indriyani 2022) mengkaji optimalisasi website 'Rekomlit' di Boyolali dengan kendala minimnya fasilitas LAN kantor; (3) Analisis (Boseren 2023) mengulas pemanfaatan website Asmatkab dengan hambatan perluasan tower BTS 4G di Papua; (4) Penelitian (Scholl and Dwivedi 2021) yang dipublikasikan di jurnal Scopus internasional, membedah evolusi global e-government dan menegaskan pentingnya interaktivitas platform; serta (5) Studi (Twizeyimana and Andersson 2019) dalam jurnal Scopus yang merumuskan matriks nilai publik (public value) dari implementasi tata kelola pemerintahan berbasis elektronik di negara berkembang.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah (Novelty)

Kebaruan ilmiah (novelty) penelitian ini terletak pada kekhasan lokus penelitian, kedalaman fokus kajian, serta pendekatan analisis yang digunakan dalam mengkaji optimalisasi website pemerintah daerah sebagai instrumen transparansi informasi publik. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada optimalisasi aplikasi pelayanan publik tertentu, aplikasi PPID, maupun website pemerintah sebagai media penyampaian informasi secara umum, penelitian ini secara khusus mengkaji portal utama Pemerintah Kabupaten Buton Selatan (butonselatankab.go.id) sebagai representasi implementasi e-government di wilayah kepulauan. Penelitian ini tidak hanya menilai keberadaan website dari aspek teknis dan fungsionalitas semata, tetapi juga menganalisis sejauh mana website tersebut mampu menjalankan perannya sebagai sarana transparansi informasi publik,

akuntabilitas pemerintahan, dan penghubung komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat (Pambayun 2017)

Penelitian ini mengintegrasikan teori E-Government yang dikemukakan oleh Richardus Eko Indrajit dengan pendekatan analisis kualitatif berbasis perangkat lunak NVivo melalui pengkodean (coding), visualisasi kluster, word frequency, dan relationship mapping untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi aktual pengelolaan website pemerintah daerah. Penggunaan analisis NVivo memberikan nilai tambah karena mampu mengidentifikasi pola hubungan antar tema, persepsi informan, serta faktor-faktor yang memengaruhi optimalisasi website secara lebih sistematis dan terukur. Pendekatan ini relatif masih jarang digunakan dalam penelitian yang mengkaji website pemerintah daerah, khususnya pada konteks transparansi informasi publik di lingkungan pemerintahan daerah. Transformasi digital sektor publik tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga perubahan tata kelola organisasi, budaya kerja, dan pola interaksi antara pemerintah dengan masyarakat (Mergel, Edelmann, and Haug 2019). Keberhasilan implementasi e-government sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam menciptakan nilai publik melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, kualitas layanan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Twizeyimana and Andersson 2019)

Penelitian ini memiliki keunikan karena menempatkan karakteristik geografis Kabupaten Buton Selatan sebagai daerah kepulauan sebagai salah satu variabel kontekstual yang memengaruhi keberhasilan implementasi website pemerintah daerah. Kondisi geografis yang terdiri atas wilayah kepulauan dengan akses jaringan internet yang belum merata menimbulkan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek teknologi informasi, tetapi juga menganalisis keterkaitan antara hambatan geografis, ketersediaan infrastruktur digital, kapasitas sumber daya manusia, tata kelola informasi, serta kesiapan kelembagaan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai leading sector dalam pelaksanaan transformasi digital daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam pengembangan kajian e-government, khususnya terkait optimalisasi website pemerintah daerah sebagai instrumen transparansi informasi publik pada wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik berbeda dengan daerah perkotaan atau wilayah daratan pada umumnya. Pendekatan ini juga didukung oleh penelitian Criado, Sandoval-Almazan, dan Gil-Garcia (2021) yang menyatakan bahwa inovasi pemerintahan digital membutuhkan integrasi antara teknologi, kapasitas organisasi, dan lingkungan institusional agar mampu menghasilkan pelayanan publik yang efektif dan berkelanjutan (Criado, Sandoval-Almazan, and Gil-Garcia n.d.)

1.6. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif optimalisasi website Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dalam mewujudkan nilai transparansi informasi publik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk memahami fenomena sosial dan sistem secara mendalam di lapangan. Pemilihan informan riset menggunakan teknik purposive

sampling dengan total 20 informan terarah, yang terdiri dari elemen internal institusi pengelola siber (Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi dan Teknologi Komunikasi, Kepala Bidang Pengelolaan Data Center, Seksi Data dan Statistik, serta Seksi Persandian) ditambah dengan 15 orang perwakilan masyarakat lokal pengguna layanan digital Kabupaten Buton Selatan. Teknik pengumpulan data dijalankan secara simultan melalui wawancara mendalam, observasi fungsional tautan antarmuka situs, dan pengumpulan dokumen administratif kenegaraan. Guna menjamin keabsahan data ilmiah, digunakan teknik triangulasi yang mencakup triangulasi sumber (membandingkan persepsi aparatur dengan keluhan pengguna) dan triangulasi teknik (menguji konsistensi transkrip wawancara dengan temuan observasi visual situs). Analisis data kualitatif diproses melingkar melalui tahapan reduksi data teks, penyajian data display, penarikan kesimpulan verifikatif, dengan berbantuan perangkat lunak komputer NVivo 12 Plus untuk memetakan frekuensi kata (word cloud) dan matriks kluster konseptual (treemap) berdasarkan bobot rujukan naskah (coding references) (Gati Ardiansyi and Nurrahman 2025)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian didasarkan pada visualisasi pengkodean kluster software NVivo 12 Plus dan pisau analisis Teori Fungsi Website E-Government yang dirumuskan oleh Richardus Eko Indrajit, meliputi lima dimensi fungsional yaitu informasional, interaktif, transaksional, transparansi-akuntabilitas, serta fungsi edukatif. Hasil analisis frekuensi data menunjukkan bahwa 'Faktor Penghambat (Tantangan Utama)' menempati porsi dominan, disusul oleh dimensi interaktif dan informasional (Indrajit 2016)

Tabel 1. Matriks Rujukan Kode (Coding References) Node Analisis Perangkat Lunak NVivo

Kategori Node Utama	Jumlah Rujukan Kode	Interpretasi Aktual Lapangan
Infrastruktur Jaringan Siber	12	Kendala sinyal dan blank spot siber di Lapandewa menurunkan reliabilitas situs.
Kualitas dan Kuantitas SDM	9	Keterbatasan jumlah pranata komputer, operator belajar mengelola secara otodidak.
Minimnya Sosialisasi Lapangan	9	Trafik kunjungan rendah akibat ketiadaan sosialisasi merata di wilayah kepulauan.
Kapasitas Respon Aduan	9	Keterlambatan tindak lanjut umpan balik warga pada kanal pengaduan siber daerah.
Partisipasi Masyarakat	9	Keterlibatan warga memanfaatkan portal rendah disebabkan oleh rendahnya literasi digital.
Fitur Integrasi OPD	8	Tampilan menu Web OPD belum lengkap, baru mengintegrasikan 3 dinas teknis lokal.
Ketersediaan Informasi Publik	7	Penyajian berkas dokumen berkala belum merata dan belum diperbarui rutin.

3.1. Dimensi Fungsi Informasional

Secara umum, ketersediaan data pada portal utama Pemerintah Kabupaten Buton Selatan telah memuat berbagai komponen informasi publik dasar seperti profil kepala daerah, visi dan misi pemerintah daerah, profil organisasi perangkat daerah, pengumuman umum, berita daerah, serta informasi terkait kegiatan pemerintahan. Keberadaan informasi tersebut menunjukkan bahwa website telah menjalankan

fungsi dasarnya sebagai media penyampaian informasi publik kepada masyarakat. Fungsi informasional ini merupakan tahapan awal dalam implementasi e-government yang bertujuan untuk menyediakan akses informasi yang cepat, mudah, dan terbuka bagi masyarakat (Indrajit, 2016).

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa konsistensi pemeliharaan dan pembaruan informasi belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola website, diketahui bahwa beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum secara rutin mengirimkan data dan informasi terbaru kepada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai administrator website. Akibatnya, sejumlah informasi yang ditampilkan pada website tidak mencerminkan kondisi aktual dan terkini. Ketidaksinkronan informasi tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat serta mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap media informasi pemerintah daerah (Rattu, Pioh, and Sampe 2022)

Keberhasilan transparansi informasi publik melalui website pemerintah sangat dipengaruhi oleh kelengkapan, akurasi, dan keberlanjutan pembaruan informasi yang disediakan kepada masyarakat (Johannes 2017). Rendahnya kualitas dan konsistensi pembaruan konten merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan website pemerintah daerah belum mampu berfungsi secara optimal sebagai media pelayanan informasi publik (Boseren 2023).

3.2. Dimensi Fungsi Interaktif

Dimensi fungsi interaktif berkaitan dengan kemampuan website dalam memfasilitasi komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Pada website Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, fungsi ini diwujudkan melalui penyediaan fitur Layanan Pengaduan Masyarakat yang memungkinkan masyarakat menyampaikan kritik, saran, maupun pengaduan terkait pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara konseptual, keberadaan fitur tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.

Penelitian menunjukkan bahwa fungsi interaktif tersebut belum berjalan secara efektif. Berdasarkan keterangan informan dari unsur masyarakat, berbagai aduan yang disampaikan melalui website sering kali tidak memperoleh tanggapan yang cepat dan memadai. Bahkan dalam beberapa kasus, aduan yang telah dikirimkan tidak mendapatkan tindak lanjut yang jelas dari instansi terkait. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fitur interaktif yang tersedia belum didukung oleh mekanisme pengelolaan yang terstruktur dan berkelanjutan (Hashim and Fadhil 2017).

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa hingga saat penelitian dilakukan, belum terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang secara khusus mengatur proses penerimaan, verifikasi, disposisi, dan penyelesaian aduan masyarakat yang masuk melalui website. Akibatnya, koordinasi antar-OPD dalam menindaklanjuti laporan masyarakat masih berjalan secara tidak sistematis. Keberhasilan layanan informasi publik berbasis digital sangat dipengaruhi oleh koordinasi antarunit kerja dan kejelasan mekanisme tindak lanjut pelayanan (A Nurrahman, Sabaruddin, and Salma 2022). Partisipasi masyarakat melalui e-government hanya dapat terwujud apabila pemerintah mampu menyediakan sistem komunikasi digital yang responsif, transparan, dan berkelanjutan (Twizeyimana and Andersson 2019)

3.3. Dimensi Fungsi Transaksional

Fungsi transaksional merupakan salah satu indikator penting dalam perkembangan implementasi e-government karena memungkinkan masyarakat memperoleh pelayanan publik secara elektronik tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan. Berdasarkan hasil penelitian, website Pemerintah Kabupaten Buton Selatan belum mampu menyediakan pelayanan publik digital secara menyeluruh (end-to-end service). Sebagian besar layanan yang tersedia masih bersifat informatif dan belum terintegrasi dengan sistem pelayanan elektronik yang memungkinkan masyarakat melakukan proses administrasi secara penuh melalui media digital (Khoirunisa 2021a).

Website saat ini lebih banyak digunakan sebagai media publikasi persyaratan administrasi, prosedur pelayanan, dan informasi terkait pelayanan publik. Sementara itu, proses pendaftaran, verifikasi dokumen, hingga penyelesaian layanan masih mengharuskan masyarakat untuk hadir secara langsung di kantor dinas terkait. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi e-government di Kabupaten Buton Selatan masih berada pada tahap informasi dan interaksi serta belum mencapai tahap transaksi dan transformasi digital secara optimal.

Transformasi digital sektor publik memerlukan integrasi antara teknologi informasi, proses bisnis organisasi, dan kapasitas kelembagaan agar mampu menghasilkan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Dengan demikian, pengembangan layanan digital berbasis website menjadi salah satu kebutuhan yang perlu diprioritaskan dalam mendukung implementasi SPBE di Kabupaten Buton Selatan (Mergel, Edelmann, and Haug 2019)

3.4. Dimensi Fungsi Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konteks website pemerintah, kedua prinsip tersebut diwujudkan melalui penyediaan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, perencanaan pembangunan, capaian kinerja pemerintah, serta berbagai bentuk pertanggungjawaban publik lainnya. Oleh karena itu, website seharusnya menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk memperoleh akses terhadap informasi pemerintahan secara terbuka (Matheus et al. 2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi transparansi dan akuntabilitas pada website Pemerintah Kabupaten Buton Selatan masih belum berjalan secara optimal. Beberapa dokumen strategis seperti APBD, laporan realisasi anggaran, laporan kinerja instansi pemerintah, dan laporan keuangan daerah belum tersedia secara lengkap maupun diperbarui secara berkala. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan daerah (Ikhbaluddin and Kawuryan 2022).

Penerapan e-government dengan implementasi website pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan e-government, khususnya sebagai media penyebarluasan informasi publik dan sarana komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Penelitian tersebut menemukan bahwa keberhasilan pengelolaan website pemerintah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan platform digital semata, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, dukungan infrastruktur teknologi informasi, koordinasi antar perangkat daerah, serta komitmen organisasi dalam melakukan pembaruan informasi secara berkelanjutan. (Nurnawati et al. 2024).

3.5. Diskusi Temuan Utama dan Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil penelitian, optimalisasi website Pemerintah Kabupaten Buton Selatan masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat multidimensional. Faktor pertama adalah hambatan infrastruktur teknologi informasi. Kondisi geografis Kabupaten Buton Selatan sebagai wilayah kepulauan menyebabkan kualitas jaringan internet belum merata di seluruh wilayah. Beberapa kecamatan, khususnya wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan, masih mengalami keterbatasan akses internet yang berdampak pada rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan digital pemerintah (Agung Nurrahman and Bagau 2023).

Faktor kedua adalah hambatan sumber daya manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah tenaga teknis yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan website, pengembangan aplikasi, keamanan siber, dan pengelolaan data digital masih sangat terbatas. Sebagian besar operator website merangkap tugas administrasi lainnya sehingga proses pembaruan informasi dan pengembangan website belum dapat dilakukan secara maksimal. Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam keberhasilan layanan digital pemerintahan (Tyas and Choiriyah 2024)

Faktor ketiga adalah keterbatasan anggaran. Keterbatasan pembiayaan berdampak pada minimnya kegiatan sosialisasi website kepada masyarakat, terbatasnya pengembangan fitur digital baru, serta rendahnya frekuensi pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat pemanfaatan website oleh masyarakat masih relatif rendah dibandingkan dengan potensi yang dimiliki. Selain itu, keterbatasan anggaran juga memengaruhi upaya pemeliharaan server, pengembangan sistem keamanan siber, dan peningkatan kualitas layanan digital yang tersedia.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi website Pemerintah Kabupaten Buton Selatan belum sepenuhnya mampu mendukung terwujudnya transparansi informasi publik. Diperlukan upaya perbaikan yang komprehensif melalui peningkatan infrastruktur teknologi informasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, penyempurnaan tata kelola website, peningkatan koordinasi antar-OPD, serta pengembangan layanan digital yang lebih interaktif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, website pemerintah daerah dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen utama dalam mendukung implementasi e-government dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Optimalisasi website Pemerintah Kabupaten Buton Selatan (butonselatankab.go.id) dalam mewujudkan transparansi informasi publik dinilai belum terlaksana secara maksimal substansial. Berdasarkan kacamata fungsi e-government Indrajit, aspek informasional dan interaktif baru terpenuhi pada batas formalitas teknis tanpa didukung oleh pembaharuan data berkala, SOP responsivitas aduan yang tanggap, serta pembukaan rincian transparansi laporan fiskal keuangan daerah. Hambatan struktural penelitian ini bersifat kompleks, bersumber dari keterbatasan infrastruktur siber di wilayah blank-spot Lapandewa, minimnya jumlah pranata komputer internal, serta rendahnya literasi digital masyarakat pengguna akibat pola sosialisasi yang belum merata lintas kepulauan. Adapun rekomendasi strategis yang dirumuskan penulis guna mengakselerasi optimalisasi siber daerah meliputi: (1) Dinas Komunikasi dan Informatika wajib menyusun diklat sertifikasi

pemrograman dan tata kelola siber secara berkala bagi operator website; (2) Melakukan ekspansi perluasan bandwidth siber dan penguatan menara pemancar pemancar BTS bersama pihak swasta untuk mengikis isolasi siber di Lapandewa; (3) Membuka rubrik menu visual khusus transparansi keuangan daerah yang memuat infografis APBD dan realisasi anggaran secara rinci; (4) Menyusun regulasi SOP internal yang mengikat seluruh OPD untuk menyetorkan data berkala; dan (5) Menggalakkan kampanye literasi digital masyarakat melalui penempelan stiker petunjuk alamat website dan kode batang QR-Code di pusat pelayanan publik kelurahan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buton selatan beserta seluruh jajaran yang telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh responden penelitian serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung proses penelitian hingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Boseren, B. 2023. "Optimalisasi Website Asmatkab Sebagai Media Pelayanan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Asmat." *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau* 3(2): 137–54. https://doi.org/10.33701/jtpm.v3i2.3637

Criado, J I, R Sandoval-Almazan, and J R Gil-Garcia. "Government Innovation Through Digital Transformation." *Government Information Quarterly*. https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.10.003

Dwi, Octavia, and Sagita Sari. 2025. "1,2 1 , 2." 11(1): 49–59. https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JRAK/article/view/4703

Dwiyanto, A. 2021. *Mewujudkan Good Governance Melalui Reformasi Birokrasi Konseptualisasi Siber Pemerintahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. https://digitalpress.ugm.ac.id/book/359

Indriyani, Anisa Fasssrah. 2022. "Optimalisasi Penggunaan Website REKOMLIT (Rekomendasi Penelitian) Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Masa Pandemi Covid-19." 19. https://repositori.untidar.ac.id/index.php?bid=11271&fid=36506&p=fstream-pdf&utm

Gati Ardiansyi, Sri, and Agung Nurrahman. 2025. "Analisis Kualitas Isi Website Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat." *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan* 7(1): 81–116. https://ejournal.ipdn.ac.id/index.php/JTKP/article/view/5583

Hashim, Kamarul Faizal, and Nawar Abbood Fadhil. 2017. "Engaging with Customer Using Social Media Platform: A Case Study of Malaysia Hotels." *Procedia Computer Science* 124: 4–11. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050917328910

Ikhbaluddin, Ikhbaluddin, and Megandaru Widhi Kawuryan. 2022. "Information Technology Development (Website) in Supporting Government Communication in Depok City, West Java Province." *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan* 4(1): 50–76. https://ejournal.ipdn.ac.id/JTKP/article/view/2699

Indrajit, Richardus Eko. 2016. *Electronic Government: Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. 2nd ed. Preinexus. https://inlislite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=17239

Johannes, Ayu Widowati. 2017. "Transparansi Informasi Situs Web Institut Pemerintahan Dalam Negeri Dalam Proses Penerimaan Praja Ipdn." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa* 2(2): 98–108. https://doi.org/10.33701/jipsk.v2i2.928

Khoirunisa. 2021a. "No Title 済無 No Title No Title No Title." 6(0): 167–86. https://repository.uin-suska.ac.id/50463

Khoirunisa, S. 2021b. "Optimalisasi Penggunaan Website Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 6(0): 167–86. https://repository.uin-suska.ac.id/50463

Ma, Jinlin. 2026. "Digital Public Management Reform: Assessing the Impact of e-Government Initiatives on Administrative Transparency." *Telematics and Informatics* 107(May): 102418. https://doi.org/10.1016/j.tele.2026.102418

Matheus, Ricardo, Roel Faber, Elvira Ismagilova, and Marijn Janssen. 2023. "Digital Transparency and the Usefulness for Open Government." *International Journal of Information Management* 73(December 2019): 102690. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2023.102690

Mergel, Ines, Noella Edelmann, and Nathalie Haug. 2019. "Defining Digital Transformation: Results from Expert Interviews." *Government Information Quarterly* 36(4): 101385. https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002

Nurrahman, A, Sabaruddin, and R N L Salma. 2022. "Optimalisasi Aplikasi PPID Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kebumen." *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP)* 2(2): 106–25. https://ejournal.ipdn.ac.id/JPKP/article/view/2878

Nurrahman, Agung, and Febrie Nabiani Bagau. 2023. "Analisis Kualitas Situs Web Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Nabire Dalam Penyediaan Informasi Publik." *Jurnal Terapan*

Pemerintahan Minangkabau 3(2): 137–54. https://doi.org/10.33701/jtpm.v3i2.3637

Pambayun, Kuncoro Galih. 2017. "Analisis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat." *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja* 10(1): 97–108. https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.385

Jiang, T., Wang, Y., Lin, T., & Shangguan, L. (2021). "Evaluating Chinese government WeChat official accounts in public service delivery." *A user-centered approach. Government Information Quarterly*, 38(1): 101548. https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101548

Twizeyimana, J D, and A Andersson. 2019. "The Public Value of E-Government: A Systematic Literature Review of Scopus Publications." *Government Information Quarterly* 36(2): 167–78.. https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.01.001

Tyas, Cantika Yulianing, and Ilmi Usrotin Choiriyah. 2024. "Merevolusi Layanan Kependudukan Di Indonesia Dengan Teknologi Baru." *Indonesian Journal of Applied Technology* 1(2): 1–21.. https://doi.org/10.47134/ijat.v1i2.2715